

### **BAB III**

#### **CORPS POLISI MILITER**

Jika membahas mengenai Corps Polisi Militer, pertama kali yang harus diketahui yaitu konsep dasar dari Polisi dan Militer. Polisi merupakan suatu pranata umum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat atau sipil.<sup>1</sup> Sedangkan Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata.<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan pengertian atau konsep dasar dari Corps Polisi Militer (CPM) ialah Kesatuan Organisasi dalam Tentara Nasional Indonesia yang memiliki struktur Kepolisian dan struktur ketentaraan atau militer.<sup>3</sup>

Latar belakang sejarah pembentukan Corps Polisi Militer (CPM) tidak dapat terlepas dari proses pembentukan Organisasi Tentara Kebangsaan, “. . . di dalam tubuh organisasi BKR, untuk pengamanan dalam (intern), di bentuk Badan Keamanan Rakyat Penyidik (BKR-P) yang kelak menjadi Polisi Tentara (PT), kemudian mengalami penyempurnaan dalam organisasi tersebut sehingga terjadi perubahan nama menjadi Corps Polisi Militer (CPM) . . . ”.<sup>4</sup> Penggunaan nama atau istilah Corps Polisi Militer (CPM), baru ada pada tahun 1950, dimana pada saat itu pemerintah melakukan reorganisasi atau penyempurnaan di dalam tubuh

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. 10.

<sup>2</sup> Harold Crouch, *Politik dan Militer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 21.

<sup>3</sup> Dinas Sejarah Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-AD*, (Jakarta: Disjarahad, 1972), hal 451.

<sup>4</sup> Eddi Soekardi, *Pertempuran Konvoi Sukabumi-Ciganjur 1945-1946*, (Bandung: ), hal. 46-47., *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen Vol. V No.26*, (Jakarta: November-Desember, 2008), hal. 6-15.

organisasi TNI.<sup>5</sup> Corps Polisi Militer (CPM) memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan kesatuan-kesatuan lain yang berada dalam organisasi TNI yaitu penggunaan panji kebesaran berupa lambang Gajah Mada dan penggunaan Baret Biru sebagai topi petz.

Pada tiap-tiap Kesatuan TNI, dibentuk cabang-cabang dari Polisi Militer. Cabang-cabang CPM yang ada di kesatuan lain, terdapat beberapa perwakilan dari Markas Besar Polisi Militer (MBPM). Para anggota CPM yang bertugas di luar kesatuan, memiliki tanggung jawab yaitu menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penegak hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan kemiliteran. Anggota-anggota CPM yang bertugas menegakkan tata tertib kedisiplinan, dinamakan Provoost.

#### **A. LATAR BELAKANG SEJARAH**

Pada tanggal 23 Agustus 1945, pemerintah secara resmi mengumumkan Badan Keamanan Rakyat (BKR). pembentukan BKR merupakan awal atau cikal bakal dari pembentukan organisasi tentara kebangsaan.<sup>6</sup> Keputusan Pemerintah, menunda pembentukan organisasi tentara kebangsaan diputuskan dalam rapat sidang anggota PPKI yang ketiga, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti faktor politik, kekuatan militer dan strategi serta taktik perang yang menjangkau ruang lingkup nasional maupun internasional dengan menentukan sikap low profile agar pihak Sekutu tidak terprovokasi oleh eksistensi

---

<sup>5</sup> Berdasarkan UU No.3/1948 yang berisi mengenai organisasi TNI-AD yang di dalamnya termuat kedudukan CPM. Status kedudukan CPM termuat dalam Surat Penetapan Wakil Presiden/Menteri Pertahanan ad interm No. A/113/1948 tanggal 20 Maret 1948. Teknis pelaksanaan UU tersebut, diatur melalui Penetapan Menteri Pertahanan N0.126 tanggal 10 Desember 1948 kemudian diperbarui melalui Penetapan Menteri Pertahanan No.137/MP/50 tanggal 8 April 1950.

<sup>6</sup> Surat Keputusan Presiden No. 63/1993.

Republik sehingga tidak mengambil tindakan-tindakan represif.<sup>7</sup> Sikap low profile yang diterapkan oleh pemerintah salah satunya yaitu kebijakan untuk membentuk suatu barisan laskar rakyat militia.<sup>8</sup> Keputusan pemerintah membentuk organisasi BKR, mendapat respon keras dari kalangan pemuda-pemuda, sebab para pemuda berpendapat bahwa suatu organisasi tentara kebangsaan adalah suatu persyaratan untuk kemerdekaan dan suatu organisasi angkatan perang mutlak diperlukan untuk menangkal kekuatan-kekuatan asing yang membahayakan eksistensi Republik.

Para pemuda terbagi menjadi dua yaitu golongan yang menerima dan menolak pembentukan BKR sebagai pengganti organisasi tentara kebangsaan. Pemuda-pemuda yang menerima pembentukan BKR sebagai pengganti dari organisasi tentara kebangsaan, Sebagian pemuda merupakan mantan anggota PETA, Giyugun, Heiho. Mereka memutuskan untuk masuk kedalam keanggotaan BKR, dengan menjadi bagian dari BKR mereka mempergunakan semaksimal mungkin organisasi ini sebagai wadah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melindungi kedaulatan wilayah NKRI. Sedangkan pemuda-pemuda lainnya yang tidak menerima keputusan pemerintah dalam pembentukan BKR, mereka bekerjasama bersama-sama dengan rakyat untuk ikut berjuang dengan cara membentuk Badan-Badan Perjuangan atau laskar-laskar rakyat.

---

<sup>7</sup> Nugroho Notosusanto, *The PETA army during Japanese occupation in Indonesia*, (Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 1979), hal. 172-173.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 180. sebagai catatan penjelasan mengenai barisan laskar rakyat militia yang berasal dari kata atau istilah militia. Dalam *Dictionary English to English*, Istilah militia memiliki beberapa makna yaitu military prantice or system, military service, a particular military force, home reserve, and the whole body of able-bodied male citizens declared by law as being subject to call to military service. Beberapa pengertian dari kata military yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah military digunakan dalam penyebutan satuan-satuan pemberontak bersenjata, satuan-satuan bersenjata tidak resmi atau non pemerintah.

Pemerintah secara langsung mengatur struktur organisasi BKR pusat, dengan membentuk Badan Keamanan Rakyat Penyelidik yang di tempatkan pada pos-pos BKR yang berada di daerah-daerah. Badan Keamanan Rakyat Penyelidik (BKR-P) mempunyai fungsi dan tugas antara lain yaitu sebagai penyidik situasi yang terjadi pada saat itu, melucuti persenjataan yang masih dimiliki oleh pasukan Jepang yang masih berada di Indonesia, dan mengatur serta mengamankan kondisi intern BKR.<sup>9</sup> Anggota-anggota BKR-P berasal dari anggota laskar-laskar perjuangan yang statusnya berada di luar dari satuan-satuan BKR, mereka direkrut oleh pemerintah pusat untuk bergabung dengan satuan-satuan BKR lainnya.

Badan Keamanan Rakyat Penyelidik (BKR-P) terdapat di daerah Malang dan Besuki. Struktur kepengurusan di dalam BKR-P disusun seperti struktur kepengurusan yang terdapat dalam batalyon, sebagai contoh BKR-P di Malang, keanggotaannya berasal dari bekas anggota Malang Syu Zibakutai yang sudah dilatih oleh Shodancho PETA selama tiga bulan, para pelajar sekolah menengah, pemuda-pemuda sipil, dan bekas anggota Seinen Dozyo yang telah dilatih sebagai bintangara Tentara PETA selama enam bulan.<sup>10</sup> Seluruh jumlah anggota BKR mencapai 340.000 personil.<sup>11</sup> Badan Kemanan Rakyat (BKR) memiliki fungsi sebagai pusat konsentrasi perlawanan bersenjata di daerah-daerah dan tidak menjadi unsur bantuan aparat kepolisian daerah. Pada saat Kependudukan Jepang, polisi atau keibodan berfungsi sebagai organisasi sipil bukan militer dan

---

<sup>9</sup> Jurnal Intelejen & Kontra Intelijen, *op. Cit*, hal. 20.

<sup>10</sup> Purbo S. Suwondo, *PETA dan Kebangkitan Keprajuritan Nasional*, (Jakarta: , 1994), hal. 198., Soedianto Sastroatmodjo dan Abdul Kahar, "*TKR Divisi VII Untung Suropati*" *Malang Besuki 1945 - 1948*, (Malang: UM Press Malang, 2000), hal. 85.

<sup>11</sup> G.D. Larson, *PETA: "the early origins of the Indonesia Army"*, (Hawai: University of Hawai, 1970), hal. 110.

digunakan untuk kegiatan-kegiatan perlindungan serangan udara Sekutu (Lucht Beacherming), tidak dipersenjatai dan tidak ada hubungan dengan organisasi militer.<sup>12</sup> anggota-anggota BKR sendiri merupakan bekas anggota angkatan bersenjata baik buatan Jepang maupun Belanda serta Badan-Badan Semi Militer yang menguasai taktik dan strategi kemiliteran.<sup>13</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah memutuskan membentuk organisasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Seluruh rakyat dengan antusias ikut mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari keanggotaan TKR, selain itu juga anggota Giyugun, PETA, Heiho dan KNIL yang sejak awal bergabung dalam BKR dengan segera mentransformasikan diri menjadi anggota TKR. Keanggotaan TKR ini terbentuk secara sukarela, spontan dan alamiah yang memiliki satu tujuan bersama untuk membentuk kekuatan bersenjata yang dapat mempertahankan kemerdekaan dan melindungi kedaulatan bangsa Indonesia.

Pemerintah mengangkat Supriyadi sebagai Panglima Tertinggi TKR dan juga mengangkat mantan KNIL Mayor Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf TKR. Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat (MB-TKR) berada di Yogyakarta, penempatan daerah yang dipilih sebagai MB-TKR bertujuan untuk menghindari pasukan Sekutu yang pada akhir September sudah mulai menduduki kepulauan Indonesia dan menguasai Jakarta.<sup>14</sup> Anggota-anggota TKR berasal dari berbagai macam lapisan sosial masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, sebagian dari mereka belum mengerti

---

<sup>12</sup> Purbo S. Suwondo, *“Beberapa perspektif sejarah gerakan kebangsaan dan pengalaman keprajuritan untuk Indonesia merdeka 1942-1945”*, (Jakarta: Monograf, 1999), hal. 33-36.

<sup>13</sup> Nina H. Lubis, dkk, *PETA : Cikal Bakal TNI*, (Bandung: UNPAD, 1999), hal.25.

<sup>14</sup> T. B. Simatupang, *“The Role of the Military”*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1954), hal. 14.

seperti apa hakekat disiplin dalam kemiliteran.<sup>15</sup> Mayor Jenderal Oerip Soemohardjo selaku Kepala Staf Umum TKR, mengumumkan struktur organisasi yang berlaku di MB-TKR. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbagi dalam empat daerah Komandemen yang berada di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Divisi-divisi yang ada di masing-masing daerah komandemen hanya mengikuti instruksi yang diperintahkan oleh Komandan tersebut. Sulit menerapkan peraturan yang berlaku karena untuk mengatur kedisiplinan dan tata tertib prajurit diperlukan peraturan yang keras dan terdapat sanksi yang berlaku jika melanggar. Keadaan keanggotaan tentara kebangsaan yang tidak dapat dikendalikan membuat pemerintah semakin terdesak. Pemerintah tidak hanya mendapatkan masalah yang datang dari dalam tetapi juga dari luar, agar permasalahan tidak berlarut-larut terutama yang menyangkut kondisi dalam negeri, pemerintah memberikan instruksi kepada komandan-komandan Komandemen yang mempunyai hak untuk mengatur apa yang harus diterapkan di wilayahnya masing-masing. Markas Besar Umum Tentara juga meminta tiap-tiap Komandan yang berada di daerah Komandemen tidak perlu melapor ke pusat setiap terjadi peristiwa atau pelanggaran militer.

Situasi keamanan berada dalam keadaan darurat, walaupun dalam keadaan terdesak masih terpikirkan gagasan untuk mengubah semua agar bisa dikendalikan terutama menerapkan kedisiplinan bagi seluruh prajurit organisasi tentara kebangsaan. Gagasan dari beberapa orang untuk membentuk badan yang mengatur kedisiplinan tata tertib dan badan peradilan untuk lingkungan

---

<sup>15</sup> A. H. Nasution, "*TNI Vol. I*", (Jakarta: Seruling Mas, 1970), hal. 96.

kemiliteran. Gagasan tersebut diungkapkan oleh Kolonel Dr. Soetjipto dan Kapten S. Parman. Isi gagasan itu menyarankan agar dibentuknya Polisi Tentara di dalam Bagian Penyelidik Pusat di Markas Besar Umum Tentara. Pada tanggal 8 Desember 1945, Jenderal Urip Sumoharjo sebagai Kepala Umum Tentara Keamanan Rakyat (TKR) memerintahkan anggota-anggota tiap-tiap resimen-resimen, divisi-divisi mematuhi peraturan yang diterapkan oleh Polisi Tentara.

Pada tanggal 18 Desember 1945, diadakan rapat akbar di Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer. Hasil keputusan dalam rapat akbar tersebut yaitu pembentukan Markas Tertinggi Polisi Tentara (MTPT) dan menetapkan Kolonel R. Prabu Sunaryo sebagai Komandan Polisi Tentara. Dalam struktur organisasi Markas Tertinggi TKR, Polisi Tentara pada mulanya menjadi bagian dari Badan Penyelidik Pusat. Badan ini terdiri atas penyelidik masyarakat Umum, Penyelidik Militer Khusus dan Polisi Tentara. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1946, pemerintah mengumumkan pembubaran Penyelidik Militer Khusus (PMC).

Awal tahun 1946, di daerah Wonosobo tepatnya di Kopeng, diadakan kembali rapat antara pimpinan Penyelidik Masyarakat Oemoem (PMO) dan Polisi Tentara (PT). Rapat tersebut menghasilkan berbagai keputusan antara lain yaitu menetapkan Gajah Mada sebagai lambang dari Polisi Tentara, menetapkan Komandan Polisi Tentara (Jenderal Mayor Santoso) dan Wakil Komandan Polisi Tentara (Kolonel R. Prabu Sunaryo). Setelah rapat tersebut, maka secara resmi Polisi Tentara memiliki kedudukan yang sama dengan semua angkatan bersenjata yang terdapat dalam tubuh organisasi tentara kebangsaan. Hal ini mempunyai

maksud bahwa setelah rapat tersebut kedudukan Polisi Tentara tidak lagi merupakan bagian dari Badan Penyelidik Pusat tetapi berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yang sama dengan semua angkatan yang ada didalam tubuh TNI (AD, AL, dan AU). Kemudian pada tanggal 3 Mei 1946, pemerintah mengumumkan pembubaran Penyelidik Militer Khusus (PMC). Pelaksanaan tugas dan fungsinya Polisi Tentara, mengkoordinasikan anggota-anggota Polisi Tentara untuk berada di tiap-tiap resimen-resimen dan divisi-divisi angkatan bersenjata.

Pada tanggal 22 Juni 1946, Presiden Ir. Soekarno secara resmi mengesahkan nama kebesaran Mahapatih Kerajaan Majapahit “Gajah Mada” sebagai lambang kesatuan Polisi Tentara. Selain itu Polisi Tentara juga menggunakan baret berwarna biru yang digunakan sebagai pengganti topi petz. Anggota-anggota Polisi Tentara harus lebih dahulu mencontohkan kedisiplinan yang kemudian akan ditiru oleh anggota-anggota angkatan bersenjata lain, semua sifat dan sikap anggota Polisi Tentara harus tercermin dalam sikap dan jiwa Panca Dharma Corps Panca Dharma Corps merupakan pedoman dalam menjalankan tugas bagi anggota PT. Sikap dan Jiwa Panca Dharma Corps terdiri atas sifat kesatria, sifat bijaksana, pantang mundur, kebesaran hati dan kejujuran.

Kedudukan Polisi Tentara termuat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 yang berisi tentang pengaturan secara yurisdiksi dan wewenang Polisi Tentara antara lain Polisi Tentara ditetapkan sebagai badan Peradilan, dan Polisi Tentara tidak menjadi bawahan dari pada Komandan suatu Kesatuan Militer melainkan kedudukannya sejajar. Pada awal Juni 1946, dilaksanakan rapat bersama antara Pimpinan Penyelidik Masyarakat Oemoem (PMO) dan Polisi



Tentara (PT) di Kopeng, Jawa Tengah yang bertempat di Hotel Dieng. Hasil dari musyawarah bersama tersebut antara lain merumuskan pokok-pokok tugas dan organisasi Polisi Tentara dan memilih Mayor Santoso sebagai Komandan Polisi Tentara<sup>16</sup> dan Kolonel Prabu Sunaryo sebagai Wakil Komandan.

Pada tanggal 22 Juni 1946 bertempat di alun-alun Yogyakarta, Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi secara resmi mengesahkan nama kebesaran Mahapatih Kerajaan Majapahit “Gajah Mada” sebagai lambang kesatuan Polisi Tentara.<sup>17</sup> Anggota-anggota Polisi Tentara harus memiliki jiwa Panca Dharma Corps yang merupakan pembeda dengan angkatan bersenjata lainnya. Setelah diresmikannya lambang kesatuan Polisi Tentara.<sup>18</sup>

Polisi Tentara yang berada di tiap-tiap daerah Komandemen lebih dikenal dengan sebutan Divisi Gajah Mada. Divisi tersebut membawahi tiga Resimen yaitu Resimen I (Jawa Barat), Resimen II (Jawa Tengah) dan Resimen III (Jawa Timur). Tiap-tiap Resimen membawahi beberapa batalyon. Tiap-tiap batalyon membawahi beberapa Kompi-kompi dan seksi-seksi dengan daerah penugasan yang pada umumnya menyerupai pembagian daerah administratif pemerintahan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan Polisi Tentara membentuk Batalyon Mobil Polisi Tentara. Tugas dari batalyon Mobil Polisi Tentara untuk keperluan patroli yang dilakukan anggota Polisi Tentara.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Purnawirawan Kolonel CPM M. Sakri, mengungkapkan bahwa setelah diangkat menjadi Panglima atau Komandan Polisi Tentara, Mayor Sunaryo diberi pangkat Jenderal Mayor. Masa jabatan Jenderal Mayor R. Prabu Santoso dari tahun 1946 samapai tahun 1948).

<sup>17</sup> Nama dan Topeng Gajah Mada yang dijadikan sebagai ciri khas Polisi Tentara selain itu terdapat pula yang lainnya antara lain baret yang digunakan sebagai pengganti topi petz.

<sup>18</sup> Setiap anggota Polisi Tentara harus memiliki sikap dan jiwa Panca Dharma Corps sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Yang merupakan Sikap dan Jiwa Panca Dharma Corps yaitu sifat kesatria, sifat bijaksana, pantang mundur, kebesaran hati dan kejujuran.

Anggota-anggota Polisi Tentara yang bertugas di luar lingkungan Markas Besar Polisi Tentara memiliki penyebutan nama yang berbeda-beda di setiap kesatuan angkatan bersenjata antara lain yaitu Angkatan Darat (Polisi Tentara TKR), Angkatan Laut (Polisi Tentara Laut/PTL), Angkatan Udara (Polisi Tentara Udara/PTU)<sup>19</sup> dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer (Pengawas Militer/PM).<sup>20</sup> Diantara badan-badan polisi tentara tersebut, hanya Polisi Tentara (Angkatan Darat) yang secara yuridiksi memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyempurnaan susunan organisasi Polisi Tentara terus dilakukan sejalan dengan penyempurnaan TNI. Salah satu bentuk penyempurnaan yang terjadi pada organisasi Polisi Tentara adalah penggantian nama dari Polisi Tentara menjadi Polisi Militer.<sup>21</sup> Upaya yang dilakukan untuk menyatukan beberapa badan polisi tentara menjadi satu kesatuan terutama di pulau Jawa yaitu pada bulan Nopember 1947 diadakannya pertemuan antara Petinggi Polisi Tentara Angkatan Darat dengan Petinggi Polisi Tentara dari angkatan bersenjata lain. Untuk lebih jelas mengenai Polisi Tentara Sumatera dan Jawa akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Polisi Tentara di Sumatera

---

<sup>19</sup> Polisi Militer yang berada dalam Angkatan Udara baru terdapat pada Staf di tingkat pusat.

<sup>20</sup> Dengan penyebutan nama yang berbeda-beda pada setiap angkatan sehingga Komandan Polisi Tentara menamakan anggota Polisi Tentara yang bertugas di luar lingkungan MBPT yaitu Divisi Gajah Mada.

<sup>21</sup> Penyempurnaan organisasi di dalam tubuh Polisi Tentara dimusyawarahkan bersama antara pimpinan Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer dengan perwakilan anggota Polisi Tentara yang berada di berbagai daerah. Hasil dari musyawarah tersebut yaitu mengganti nama Polisi Tentara menjadi Corps Polisi Militer (CPM). Sebenarnya yang dimaksud dengan istilah Corps yaitu Kesatuan. Jadi CPM memiliki arti Kesatuan Polisi Militer.

Di Sumatera sejak dari TKR terdiri dari 6 Divisi.<sup>22</sup> Seiring dengan pembentukan TRI di Sumatera ditunjuk Panglima Komandemen Sumatera Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo. Pada masa TRI ini, dalam melaksanakan tugasnya satuan-satuan Polisi Tentara pun mulai disempurnakan. Di dalam penyempurnaan Polisi Tentara di Sumatera dalam satu Komando maka diadakan Konferensi TRI.<sup>23</sup>

Penyempurnaan Polisi Tentara di Sumatera pada saat diadakannya reorganisasi,<sup>24</sup> dan mendirikan pusat pendidikan latihan di Bukit Tinggi.<sup>25</sup> Pada masa RERA, divisi-divisi di Sumatera berubah nama seperti Divisi I dan II menjadi Divisi Garuda I dan II, Divisi IV menjadi Divisi Gajah II, Divisi V menjadi Divisi Gajah I, Divisi VI menjadi Divisi Banteng I, dan Divisi III menjadi Divisi Banteng II. Untuk mempermudah koordinasi antar Divisi maka dibentuknya Sub-Sub Komandemen.<sup>26</sup>

Walaupun telah dibentuknya sub-sub Komandemen masih saja terlihat kesulitan dalam berkoordinasi antar satuan-satuan Polisi Tentara.

---

<sup>22</sup> Divisi I di Sumatera Selatan dengan markas pusat di Lahat, Divisi II di Sumatera Selatan meliputi bagian Utara, Timur serta Bangka Belitung dengan markas pusat di Palembang, Divisi III di Sumatera Barat dan Riau dengan markas pusat di Bukit Tinggi, Divisi IV di Sumatera Timur dengan markas pusat di Medan, Divisi V di Aceh dengan markas pusat di Bireun, dan Divisi VI di Tapanuli dengan markas pusat di Sibolga.

<sup>23</sup> Konferensi TRI yang pertama pada tahun 1946 di Bukit Tinggi dengan hasil diangkatnya Kolonel Ahmad Tahir menjadi Komandan Polisi Tentara se-Sumatera. Pada awalnya Kolonel Ahmad Tahir merupakan Komandan Divisi IV Sumatera yang kemudian menjadi Divisi Gajah II, saat ia diangkat sebagai Komandan Polisi Tentara se-Sumatera maka jabatannya sebagai Komandan Divisi Gajah II diserahkan kepada Kolonel H. Sitompul.

<sup>24</sup> Reorganisasi ini terjadi pada tanggal 1 April 1946. Hasil dari reorganisasi ini ialah pengangkatan Kapten Abubakar Majid menjadi Kepala Polisi Tentara Bagian Divisi I.

<sup>25</sup> Berdasarkan Instruksi Panglima Sumatera Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo dalam menyempurnakan tugas-tugas dan melengkapi personil maka pada tanggal 20 April 1946 dikirim 63 orang Calon Polisi Tentara untuk mengikuti latihan di Bukit Tinggi.

<sup>26</sup> Untuk lebih jelas lihat kembali lampiran XII.

Terlihat pula yang sangat mencolok antar satuan-satuan Polisi Tentara yang membuat semakin berbeda antara yang satu dengan yang lain yaitu dalam berpakaian seragam.<sup>27</sup> Revolusi sosial yang terjadi di Sumatera Timur mengakibatkan kekacauan, dimana hukum yang berlaku yaitu diindentikan dengan hukum rimba.<sup>28</sup>

Pada bulan Desember 1946, Polisi Tentara Komandemen Sumatera mengadakan Konferensi Polisi Tentara se-Sumatera Utara<sup>29</sup> yang diadakan di Balai dalam rangka untuk mengadakan konsolidasi organisasi sehubungan telah diubahnya susunan Divisi dan telah terbentuknya Polisi Tentara Komandemen Sumatera di bawah Kolonel A. Tahir.

Setelah Konferensi Polisi Tentara tersebut kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Langsa oleh Polisi Tentara Divisi Gajah I.<sup>30</sup> Hasil dari Konferensi Langsa antara lain yaitu menghasilkan keputusan menyatukan

---

<sup>27</sup> Yang menjadi pembeda antara Tentara biasa dengan Polisi Tentara hanya pemakaian ban lengan merah dengan tanda PT putih.

<sup>28</sup> Revolusi Sosial ini terjadi pada akhir 1945. Revolusi ini sangat menakutkan dimana adanya pembunuhan, penahanan dan perampasan harta benda oleh laskar-laskar tertentu terhadap para kaum feodal. Pada bulan Juni 1946, kaum feodal yang selamat mendirikan organisasi Persatuan Anak Deli Islam (PADI) untuk melawan laskar-laskar yang telah melakukan revolusi tersebut. Kekacauan ini membuat Polisi Tentara harus turun tangan langsung untuk menertibkan kembali wilayah Sumatera Timur.

<sup>29</sup> Tujuan dari Konferensi ini ialah untuk menjelaskan langsung langkah-langkah kebijaksanaan taktis administratif yang baru. Kemudian Polisi Tentara Divisi Gajah I dan II secara organisatoris dibawah Komando Sub Komandemen III Bagian Polisi Tentara yang berkedudukan di Kutaraja di bawah pimpinan Kapten A. Muzakir Walad dengan wakilnya R. Suprpto.

<sup>30</sup> Susunan Staf Polisi Tentara Divisi Gajah I yaitu :

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Komandan              | : Kapten Abubakar Maskid    |
| 2. Ajudan                | : Letnan Muda Wan Ahmad     |
| 3. Bagian Perintah       | : Letnan Muda Effendi       |
| 4. Bagian Sekretariat    | : Letnan II Poniman         |
| 5. Bagian Organisasi     | : Letnan II Hasanuddin      |
| 6. Bagian Kepolisian     | : Letnan Muda Syamsudin     |
| 7. Bagian Keuangan       | : Letnan Muda Ahmad Marzuki |
| 8. Bagian Perlengkapan   | : Letnan Muda Akhir Ali     |
| 9. Bagian Barisan Markas | : Letnan Muda A. Rahman Ali |

Kejaksanaan Tentara di dalam tubuh Polisi Tentara, simbol Polisi Tentara Bintang Ruji Sepuluh di atas lingkaran belutru hijau (kain halus berbulu) dengan ban lengan berwarna putih di atas warna merah.

## 2. Polisi Tentara di Jawa

Pada tahun 1946, pusat pemerintahan RI berada di Yogyakarta.<sup>31</sup> Setelah diresmikannya Divisi Gajah Mada,<sup>32</sup> Polisi Tentara mulai melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan disiplin dikalangan prajurit. Markas Besar Polisi Tentara (MBPT) bertugas mengatur semua tugas dan tanggung jawab Polisi Tentara.

Di wilayah Jawa terdapat tiga (3) resimen Polisi Tentara dan satu Batalyon khusus yaitu Resimen I Polisi Tentara Jawa Barat yang dikepalai oleh Mayor Rukmana, Resimen II Polisi Tentara Jawa Tengah yang dikepalai oleh Kolonel Sunaryo dan Resimen III Jawa Timur yang dikepalai oleh Kolonel Bambang Supeno, serta batalyon khusus mobil<sup>33</sup> yang dikepalai oleh Mayor Sakri. Masih rendahnya kemampuan militer yang dimiliki oleh para anggota Polisi Tentara maka Markas Besar Polisi Tentara mendirikan pusat pendidikan Latihan Opsir Polisi Tentara di Sarangan Jawa Timur untuk membina anggota Polisi Tentara dalam hal mengenai teknik kepolisian dan hukum.

Sepanjang tahun 1947 terjadi reorganisasi dengan dihapuskannya Resimen-Resimen Polisi Tentara. Batalyon-Batalyon Polisi Tentara

---

<sup>31</sup> Di sini lah banyak kebijaksanaan dalam pembentukan tugas dan susunan Polisi Tentara

<sup>32</sup> Tanggal 22 Juni 1946, Presiden Soekarno meresmikan Divisi Gajah Mada dan diberdirikannya Markas Besar Polisi Tentara di Alun-alun Yogyakarta.

<sup>33</sup> Batalyon ini memiliki tugas sebagai satuan patroli CPM atau yang lebih dikenal dengan sebutan Provoost. Secara resmi dinas Provoost terbentuk dalam Batalyon Mobil pada masa Polisi Tentara.

langsung di bawah Komando Markas Besar Polisi Tentara hanya saja untuk koordinasi beberapa Batalyon dikelompokkan di bawah suatu badan Pengawas yang disebut Inspeksi. Hingga akhir 1947, untuk di Jawa terdapat berbagai bagian dalam Kepolisian Tentara di samping Polisi Tentara. Hal ini dapat dilihat seperti di angkatan laut ada Polisi Tentara Laut (PTL), di angkatan udara juga sebenarnya telah memiliki Polisi Tentara tetapi baru dalam staf di tingkat pusat, Badan-badan perjuangan memiliki pengawas laskar yang ketika itu dinamakan Pengawas TNI (PTNI). Akan tetapi, semua badan-badan Kepolisian Militer ini disatukan kedalam tubuh Polisi Tentara Angkatan Darat.

## **B. CORPS POLISI MILITER**

Polisi Tentara di Jawa maupun Sumatera banyak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu disebabkan banyaknya masalah pelanggaran-pelanggaran hukum atau disiplin militer dan kerusuhan yang ditimbulkan oleh satuan laskar bersenjata yang menginginkan negara seperti keinginan dan kemauan mereka sendiri. Pada saat itu pula dalam tubuh TNI mengalami Reorganisasi atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA).<sup>34</sup>

Pemerintah berusaha menyatukan badan-badan Kepolisian Tentara dengan dikeluarkannya Penetapan Menteri Pertahanan ad interim No. A/113/1948.<sup>35</sup>

Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1948 oleh Menteri Pertahanan yang berisikan

---

<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan RERA yaitu penyempurnaan didalam keorganisasian TNI agar lebih sempurna. RERA ini juga terdapat unsur politik, dimana setelah RERA, terdapat TNI-masyarakat yang merupakan gabungan dari badan-badan perjuangan yang dikendalikan oleh partai politik tertentu seperti PKI.

<sup>35</sup> Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1948 oleh Menteri Pertahanan yang berisikan tentang penghapusan Polisi Tentara, Polisi Tentara Laut, dan Pengawas Tentara Nasional Indonesia. Penyatuan semua badan-badan Kepolisian Tentara tersebut dalam satu wadah organisasi Corps Polisi Militer.

tentang penghapusan Polisi Tentara, Polisi Tentara Laut, dan Pengawas Tentara Nasional Indonesia. Penyatuan semua badan-badan Kepolisian Tentara tersebut dalam satu wadah organisasi Corps Polisi Militer.

Dengan dikeluarkannya Penetapan oleh Menteri Pertahanan maka secara resmi sejak saat itu pula terbentuknya Corps Polisi Militer (CPM). Pemerintah mengangkat sementara Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Komodor Udara Suryadi Suryadarma.

Di dalam Corps Polisi Militer terbagi dalam masing-masing angkatan seperti Polisi Tentara Angkatan Darat menjadi CPM I, Polisi Tentara Laut menjadi CPM II dan Pengawas TNI menjadi CPM III. Namun semua yang mengatur kegiatan sehari-hari dari CPM I hingga CPM III yaitu Kolonel Gatot Subroto. Untuk wilayah jangkauan dalam melaksanakan tugasnya Corps Polisi Militer ini dibagi menjadi dua wilayah yaitu Corps Polisi Militer Djawa (CPMD) dan Corps Polisi Militer Sumatera (CPMS). Adanya CPMD dan CPMS tidak lepas dari dibentuknya dua markas besar komando Djawa dan Sumatera saat Agresi Militer Belanda II.

Corps Polisi Militer Sumatera<sup>36</sup> dipimpin oleh Letnan Kolonel Widya. Markas Pusat Corps Polisi Militer Sumatera berada di Bukit Tinggi. Terdapat 5 Batalyon yang berada di bawah naungan CPMS yaitu Batalyon I di Palembang, Batalyon II di Padang, Batalyon III di Tapanuli, Batalyon IV di

---

<sup>36</sup> Perjalanan tugas yang dilakukan CPMS tidak banyak diungkapkan oleh peneliti karena sumber yang didapat mengenai CPMS sangat minim. Minimnya sumber catatan mengenai sejarah perjalanan pelaksanaan tugas CPMS, hal ini disebabkan pada saat tahun tersebut komunikasi antara pusat dengan daerah di luar pulau Jawa sangat sulit, membuat cenderung di wilayah tersebut jarang mengikuti aturan pusat.

Aceh dan Batalyon V di Sumatera Timur. Selama melaksanakan tugas-tugasnya CPMS banyak mendapat kendala.<sup>37</sup>

Banyaknya kendala yang dihadapi CPMS saat bertugas, sehingga tindakan tegas diambil oleh Komandan CPM se-Sumatera yaitu membubarkan semua bentuk organisasi CPM yang berdiri sendiri-sendiri. Hal ini membuat satuan-satuan CPM di Sumatera menyatu dengan Batalyon-Batalyon Infanteri. Setelah keputusan disatukannya CPMS dalam batalyon-batalyon Infanteri, maka CPMS masuk dalam pasukan tempur.<sup>38</sup> Susunan CPMS berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera Kolonel Hidayat No. K.2/0751 tanggal 15 Desember 1949 antara lain Komandan Batalyon I CPMS Kapten Yusuf dan Ajudan CPMS Lettu Suratno

Corps Polisi Militer Djawa<sup>39</sup> saat awal pembentukan CPM berada di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto.<sup>40</sup> Masa kepemimpinan Kolonel Gatot Subroto di CPMD tidak lama,<sup>41</sup> sehingga Markas Besar Polisi Militer mengangkat Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Corps Polisi Militer Djawa

---

<sup>37</sup> Hambatan dalam melaksanakan tugas CPM di wilayah Sumatera yang paling bermasalah yaitu terjadinya konflik bersenjata antara bekas laskar dengan TNI, peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa 10 September affair.

<sup>38</sup> Penggabungan ini mengakibatkan tugas CPMS sebagai pengatur tata tertib disiplin prajurit tidak begitu menonjol bahkan setelah penggabungan tersebut istilah CPMS mulai tidak terdengar lagi gaungnya.

<sup>39</sup> Kalau di lihat secara seksama markas pusat CPMD berada sangat dekat dengan pusat pemerintahan pada masa itu. Catatan perjalanan sejarah CPMD dalam melaksanakan tugas-tugas sangat banyak ditemukan seperti catatan harian Letnan Kolonel A.J. Mokoginta selama kepemimpinannya di CPMD.

<sup>40</sup> Kolonel Gatot Subroto menjabat sebagai Komandan Polisi Militer ketiga yang menjabat pada tahun 1948-1949.

<sup>41</sup> Tidak lamanya Kolonel Gatot Subroto memimpin CPMD, hal ini dikarenakan beliau diangkat menjadi Gubernur Militer Daerah Militer istimewa II yang meliputi wilayah tugasnya yaitu daerah Surakarta, Semarang, Madiun dan Pati.



(CPMD) juga dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengalami hambatan yang cukup besar yaitu Pemberontakan PKI di Madiun.<sup>42</sup>

Pemberontakan PKI di Madiun membuat kondisi NKRI menjadi kacau balau. Hal ini karena tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah bahwa PKI akan melakukan pemberontakan secara tiba-tiba padahal saat itu pemerintah terutama angkatan bersenjata sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Penumpasan pemberontakan PKI di Madiun sedikit mengalami kesulitan sebab anggota dari PKI sendiri merupakan bagian prajurit yang tergabung dalam Tentara Laskar Republik Indonesia yang didirikan oleh Amir Syarifuddin.

Penumpasan terhadap pemberontakan PKI di Madiun<sup>43</sup> tidak hanya dilakukan oleh CPMD tetapi secara langsung ditangani oleh Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto. Tindakan yang dilakukan Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer diantaranya yaitu pemecatan anggota militer,<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Pemberontakan PKI di Madiun membuat kondisi NKRI menjadi kacau balau, karena selama ini tidak terpikirkan bahwa PKI akan menikam dari belakang. Kondisi angkatan bersenjata juga sedang bersiap-siap menghadapi kemungkinan agresi militer II yang akan dilancarkan oleh Belanda. Pemberontakan PKI di Madiun cukup menyulitkan sebab anggota-anggota PKI di Madiun merupakan Biro Perjuangan yang didirikan oleh Amir Syaifuddin. Biro Perjuangan ini terlatih layaknya militer sendiri yang lebih dikenal TLRI. Pada tanggal 8 September 1948, Yadau, Suyoto, Karnen, Marjono dan wakil-wakil PKI mengadakan rapat untuk menentukan sikap bahwa TLRI yang mereka pimpin merupakan alat kekuatan PKI.

<sup>43</sup> PKI Madiun melakukan pemberontakan pada tahun 1948.

<sup>44</sup> Data yang didapat dari Departemen Pertahanan mengenai pemberontakan PKI di Madiun, tercantum nama tokoh-tokoh militer yang dipecat yaitu Letnan Jenderal Sukono, Kolonel Sukirman Wirosanjoyo, Kolonel Jokosuyono, Laksamana Muda Atmaji, Kolonel Katamhadi, Letnan Koonel Dahlan, Letnan Kolonel Suyoto, Letnan Kolonel Suadi, Letnan Kolonel Sudiarto, Letnan Kolonel Umar Joy, Letnan Kolonel Kusnandar. Mereka semua dipecat secara tidak terhormat karena termasuk dalam kawan pemberontakan PKI di Madiun.

mengeluarkan Dekrit tangan besi Gatot Subroto atau pengumuman untuk menumpas seluruh anggota PKI.<sup>45</sup>

Pada tahun 1949, Indonesia harus menghadapi Agresi Militer Belanda II. Markas Besar TNI membuat suatu gebrakan aksi-aksi lanjutan dalam rangka penyatuan Pemerintahan Militer, Polisi Militer dan Polisi Negara menjadi Polisi Pemerintah Militer (PPM).<sup>46</sup> Pada tanggal 27 Desember 1949, adanya perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda.<sup>47</sup> Salah satu isi dari perjanjian Konferensi Meja Bundar yaitu dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari negara bagian NKRI dan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.

Perundingan ini mengubah lagi struktur organisasi di bidang militer.<sup>48</sup> Ketegangan yang terus menerus terjadi membuat kerugian akan situasi keamanan di dalam negeri.<sup>49</sup> Untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada CPM tersebut maka untuk penyempurnaan itu Menteri Pertahanan

---

<sup>45</sup> Dalam buku yang ditulis oleh Jenderal A.H. Nasution yang berjudul :Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8”, istilah pengumuman yang dikeluarkan oleh Kolonel Gatot Subroto dinamakan Dekrit-Dekrit tangan besi Gatot Subroto. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kolonel Gatot Subroto dapat dilihat pada lampiran XX.

<sup>46</sup> Gebrakan penyatuan ini hanya berlaku di pulau Jawa saja. Tujuan dari gebrakan ini untuk mencegah meluasnya wilayah yang dapat diduduki oleh Belanda.

<sup>47</sup> Perundingan ini lebih dikenal dengan sebutan Konferensi Meja Bundar. Piagam KMB memiliki arti bahwa Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia dan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda diserahkan kepada Indonesia kecuali Irian Barat.

<sup>48</sup> Perubahan yang terjadi di bidang militer antara lain pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh TNI. Para anggota dari APRIS merupakan para anggota KNIL. Setelah penggabungan ini membuat ketegangan antara kedua kubu. Sebagian anggota KNIL menolak untuk bergabung dalam APRIS seperti pemberontakan APRA yang dipimpin oleh mantan KNIL Kapten Raymond Pierre Westerling, pemberontakan Andi Aziz yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz.

<sup>49</sup> Untuk mengakhiri kekacauan ini Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mengeluarkan Instruksi No. 60/KSAD/Instruksi/50 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1950 yang berisi agar CPM menertibkan cara berpakaian APRIS agar tidak ditiru oleh pihak yang tidak berhak menggunakannya.

mengeluarkan pembaruan Penetapan kedudukan CPM.<sup>50</sup> Pada tanggal 31 Mei 1950, seluruh anggota baik CPMD maupun CPMS dilebur menjadi satu dalam wadah CPM yang bermarkas pusat di Jakarta.<sup>51</sup>

Markas Komando Corps Polisi Militer yang berada di Yogyakarta dipindahkan ke Jakarta.<sup>52</sup> Setelah penyatuan tersebut, dikeluarkan Instruksi No. 1108/KMD/CPM/50. Pada tanggal 28 Nopember 1950 ditetapkan 7 (tujuh) Batalyon Polisi Militer untuk seluruh Indonesia.<sup>53</sup>

#### Susunan Staf Markas Besar Polisi Militer

1. Staf I (Inlichtingen/ Security)
2. Staf II (Kepolisian)
3. Staf III (Personalia)
4. Staf IV (Logistik)
5. Staf V (Organisasi/ Dislokasi, Reglementering, Inspeksi)
6. Staf VI (Pendidikan)
7. Sekretariat
8. Detasemen Markas
9. PKM (Pemegang Kas Militer)
10. PHB

---

<sup>50</sup> Pembaruan Penetapan Menteri Pertahanan No. 126 yang dikeluarkan pada 10 Desember yang diubah menjadi Penetapan Menteri Pertahanan No. 137/MP/50 pada tanggal 8 April 1950. Untuk mengetahui isi dari penetapan ini lihat lampiran XXI

<sup>51</sup> Di pindahkannya markas pusat Polisi militer dari Yogyakarta ke Jakarta. Setelah dipindahkannya ke Jakarta, Markas Pusat Polisi Militer diubah namanya menjadi Markas Besar Polisi Militer.

<sup>52</sup> Sejak itu nama Markas Komando Corps Polisi Militer dirubah menjadi Markas Besar Polisi Militer.

<sup>53</sup> Lima batalyon di Sumatera dan dua batalyon di Jawa serta satu batalyon khusus yang juga berada di Jawa. Batalyon-batalyon tersebut yaitu batalyon I di Palembang, batalyon II di Padang, batalyon III di Tapanuli, batalyon IV di Aceh, batalyon V di Sumatera Timur, batalyon I di Jawa barat, batalyon II di Jawa tengah dan Batalyon III di Jawa Timur.

11. Perpustakaan

12. Photographie/ Dactiloscopi

Susunan Yon PM<sup>54</sup> Teritorial sama dengan susunan MBPM tanpa Staf V dan Staf VI serta beberapa bagian lainnya. Tugas pokok CPM antara lain pada masa damai maupun dalam masa perang yaitu :

a. Dalam masa damai

1. CPM sebagai badan Kepolisian dalam masyarakat ketentaraan juga penegak hukum dan tata tertib tentara yang mempunyai wewenang
2. Mengusut kejahatan dan pelanggaran dalam setiap Angkatan Bersenjata baik Darat, Laut, Udara serta Polisi.
3. Mengawasi dan menegakkan jalannya peraturan tata tertib, peraturan-peraturan lain serta Undang-Undang Pemerintah Militer dan Maklumat-Maklumat lain yang sah.
4. Mencari dan menahan anggota tentara yang diduga melakukan pelanggaran maupun tindak pidana.

b. Dalam masa Perang

1. Harus bisa menjadi pengganti maupun pengatur badan kepolisian di daerah-daerah bahaya atau perang

---

<sup>54</sup> Pada saat itu Batalyon lebih dikenal dengan sebutan Yon. Yon X mempunyai tugas pokok Sebagai cadangan / bantuan untuk Yon-Yon Pm Teritorial Bilamana perlu dapat mengganti sebagian atau seluruh Yon PM Teritorial PPPM organik termasuk dalam MBPM

2. Ia harus bisa menjaga, melindungi dan mengantarkan tahanan-tahanan yang ditangkap pada waktu gerakan militer
3. Mengawal dan melindungi penduduk daerah setempat.
4. CPM mengadakan pengawasan dan penyelamatan lalu lintas ketentaraan.
5. Mengatur lalu lintas
6. Mengatur konvoi-konvoi militer di dalam dan di luar daerah perang.

Pindahnya markas CPM dari Yogyakarta ke Jakarta maka Pendidikan Corps Polisi Militer Pusat Pelatihan juga dipindahkan dari Yogyakarta ke Jawa Barat. Instruksi No. 60/KSAD/Instr/50 tanggal 1 Agustus 1950 dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Perang RI yang berisi mengenai usaha pencegahan ditirunya cara-cara berpakaian berikut tanda-tanda pangkat dan pengenal lainnya dari APRIS oleh pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya. Corps Polisi Militer dibebani tugas untuk memperhatikan dan mengawasi berjalannya instruksi tersebut dan memiliki wewenang menindak bila terjadi pelanggaran.

Undang-Undang No. 3/ 1948 disempurnakan kedudukan CPM dalam tubuh TNI, dalam pelaksanaannya termuat pada Surat Ketetapan Menteri Pertahanan No. 126 tanggal 10 Desember 1948 yang kemudian diperbarui pada tanggal 8 April 1950 melalui Surat Ketetapan Menteri Pertahanan No. 137/MP/50. Isi dari Surat Ketetapan Menteri Pertahanan<sup>55</sup> antara lain yaitu :

---

<sup>55</sup> Di tulis kembali oleh Peneliti berdasarkan salinan resmi di Bagian Arsip Markas Besar TNI

1. Polisi Militer adalah suatu satuan dari Angkatan Darat dan merupakan satu Corps untuk seluruh Angkatan Perang yang mempunyai hak dan kekuasaan pengusutan.

2. CPM menjamin keamanan dalam dan bagi kepentingan Angkatan Perang dan merupakan tenaga bantuan atau pengganti daripada Polisi.

3. CPM mengusut segala perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang dalam mana tindakan CPM sebagai Polisi Yustisi dikuasai oleh hukum pidana materiil maupun formil (KUHPT, KUHP, HIR). CPM mengusut segala pelanggaran tata tertib tentara atas perintah atau atas perintah Komandan Satuan dalam mana CPM sebagai Provoost dikuasai oleh hukum tata tertib tentara baik materiil maupun formil (KDHDT)/ Wetboek Van Krisjgstucht).

Pada Staf Angkatan Darat ditempatkan satu Corps Komando Polisi Militer, pada tiap-tiap Teritorium satu Batalyon CPM dan tiap-tiap Sub Teritorium satu Desatemen CPM. Penempatan Sub Detasemen dan Pos CPM tergantung kebutuhan keadaan. Di samping adanya Batalyon CPM, juga terdapat "Garde Batalyon" dengan tugas :

1. Penjagaan Pimpinan Negara dalam kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang
2. Pengawalan dan penghormatan
3. Kekuatan cadangan untuk memberi bantuan kepada Batalyon-Batalyon CPM lainnya dalam keadaan yang luar biasa. Adanya Depot Batalyon untuk menyelenggarakan :

- a. Penerimaan keanggotaan dari peralihan senjata (Wapenovergang) dari lain kesatuan.
- b. Latihan Kader Polisi Militer yang tidak termasuk tugas Direktorat Pendidikan atau Latihan Angkatan Darat.

Keanggotaan Corps Polisi Militer berasal dari semua angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara).<sup>56</sup> Sesuai penjelasan diatas mengenai proses pembentukan Polisi Tentara dinyatakan bahwa Polisi Tentara Angkatan Darat yang dinyatakan sebagai intinya.<sup>57</sup>

Polisi Militer merupakan bagian dari Angkatan Darat yang memiliki tugas mengatur, menertibkan disiplin prajurit serta sebagai penegak hukum dalam ruang lingkup kemiliteran. Latar belakang sejarah pendirian POMAD tidak lepas dari bagian sejarah pembentukan Polisi Tentara hingga menjadi Corps Polisi Militer. Corps Polisi Militer menggunakan nama dan simbol Gajah Mada sebagai lambang Corps.<sup>58</sup> Penggunaan nama Gajah Mada merupakan ide dari Jenderal S. Parman dan Jenderal Sutoyo.<sup>59</sup> Dengan penggunaan nama dan simbol Gajah Mada

---

<sup>56</sup> Penulis menjelaskan konteks waktu saat ini (dimulai pada tahun 2000, dimana Polisi Republik Indonesia sudah memisahkan diri dari ABRI). Pada saat awal pembentukan Polisi Tentara “cikal bakal dari Corps Polisi Militer”, yang merupakan anggota Polisi Militer pasti berasal dari Angkatan Darat. anggota-anggota POMAD ditugaskan diberbagai angkatan bersenjata di luar lingkungan Pusat Polisi Militer (PUSPOM) seperti Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi Republik Indonesia. Mereka yang bertugas di luar lingkungan PUSPOM, tetap menggunakan atribut perlengkapan serangan Polisi Militer.

<sup>57</sup> Selama perkembangan Polisi Tentara hingga pendirian Corps Polisi Militer yang banyak melakukan sumbangsih dalam pelaksanaan tugas di lapangan yaitu Polisi Militer Angkatan Darat.

<sup>58</sup> penggunaan nama dan simbol Gajah Mada sebagai lambang kesatuan berdasarkan Ketetapan No. 1300 , yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni oleh Markas Besar Polisi Militer.

<sup>59</sup> Kedua Jenderal ini berpendapat bahwa suatu lambang merupakan hal yang paling utama bagi suatu Corps. Dengan memiliki lambang maka Corps tersebut akan mempunyai rasa bangga yang akan menggerakkan jiwa dan semangat para anggotanya baik yang berada pada di tingkat atas sampai ke tingkat yang paling bawah.

diharapkan seluruh anggota CPM selalu mengayomi sifat dan sikap yang dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada.<sup>60</sup>

Lima sifat yang dimiliki Gajah Mada dijadikan kode kehormatan yang wajib terpantri atau tertanam di jiwa setiap prajurit CPM. Lima sifat tersebut beri nama Panca Dharma Corps.<sup>61</sup> Peresmian Lambang dan simbol Gajah Mada sebagai ciri khas Polisi Militer Angkatan Darat diresmikan oleh KSAD berdasarkan surat keputusan No. : Kpts-363/5/1959. POMAD juga memiliki ciri khas lainnya selain Penggunaan nama dan Lambang Gajah Mada yaitu Baret Biru<sup>62</sup> yang selalu digunakan saat melaksanakan tugas. Dengan memiliki ciri khas yang bisa mengayomi seluruh angkatan bersenjata maka pada tanggal 6 Maret 1971,

---

<sup>60</sup> Gajah Mada merupakan Mahapatih Kerajaan Majapahit yang namanya sangat tidak asing di wilayah Asia Tenggara. Ia memiliki sifat Kesatria, Bijaksana, Pantang Mundur, Kebesaran Hati dan Kejujuran. Kitab yang memuat hukum yang berlaku didalam lingkungan kerajaan Majapahit merupakan hasil ide sang Mahapatih, Kitab ini dinamakan Kitab Kutarawa. Bisa menyatukan seluruh wilayah nusantara berada di bawah panji kerajaan Majapahit merupakan cita-cita terbesarnya. Penyatuan nusantara bukan untuk melakukan penjajahan melainkan untuk menghadang kedatangan tentara mongol ke Nusantara karena pada saat itu Mongol sedang gencar melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya bahkan wilayah eropa telah didudukinya.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kolonel Sakri, mengungkapkan bahwa Panca Dharma Corps memiliki latar belakang sejarah yaitu saat Belanda melakukan Agresi Militer ke-2, seluruh satuan-satuan Polisi Militer dimasukkan dalam Wehrkreise-wehrkreise. Ketika itu yang memimpin Polisi Militer untuk wilayah Jawa ialah Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Waktu pelaksanaan tugas tersebut A.J. Mokoginta menginap di barak batalyon Mayor Surono. Pak Sudi merupakan salah satu anggota dari kesatuan ini memiliki kelebihan (dapat melakukan komunikasi dengan dunia gaib). Timbullah keinginan Letnan Kolonel A.J. Mokoginta untuk bisa berkomunikasi dengan Mahapatih Gajah Mada. Ia menanyakan kepada pak Sudi yang dalam keadaan kesurupan, Bolehkah Eyang Polisi Militer memakai nama kebesaranmu, dijawab Boleh lalu terdiam beberapa saat diucapkan lagi Boleh dengan syarat tidak boleh mundur, tidak boleh berkecil hati dalam melaksanakan tugas. Hal ini diartikan bahwa bila hari ini mengalami kegagalan teruskanlah terus usahamu untuk besok walaupun besokpun masih gagal teruslah berusaha hingga batas akhir kemampuan yang dimiliki.

<sup>62</sup> Warna Baret Polisi Militer ialah Biru. Warna tersebut terinspirasi dari bendera PBB yang selalu dikibarkan untuk menjaga perdamaian. Corps Polisi Militer Angkatan Darat mempunyai tradisi pembaretan yang memiliki ciri khas tersendiri yang selalu dilakukan di Gunung Lagadar, Cimahi. Tradisi ini dilaksanakan bagi warga baru Polisi Militer baik Perwira, Bintara dan Tamtama yang sedang melaksanakan pendidikan kecabangan di Pusdikpom. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum menyelesaikan pendidikan kecabangan, sehingga dengan dilaluinya tradisi pembaretan tersebut seorang prajurit Polisi Militer telah sah menjadi bagian dari warga Corps Polisi Militer Angkatan Darat yang mempunyai rasa kebanggaan akan Corps dan satuannya. Baret Biru merupakan baret yang menjadi kebanggaan Corps ini juga digunakan oleh Pasukan Keamanan Presiden (PASPAMPRES), dan Kepolisian bagian Provoost (Propam).



keluarkannya Keputusan Menhankam Panglima ABRI No.Kep/A/7/III/1971 yang berisi bahwa Polisi Militer Angkatan Darat merupakan pusat atau inti dari Corps Polisi Militer yang mempunyai yang pada saat itu mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap ketiga Angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) dan Polisi Republik Indonesia yang disebut Bina Tunggal.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Pada perkembangan Polisi Tentara menjadi Corps Polisi Militer, para anggota CPM sangat identik dengan angkatan darat (Pomad Para). Anggota-anggota CPM tersebut memiliki keahlian melebihi semua kesatuan yang terdapat di dalam angkatan bersenjata, mereka memiliki keahlian yang dimiliki oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Polisi Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada anggota CPM yang tergolong dalam angkatan terakhir 85, dimana anggota CPM dapat menjadi bagian dari pasukan tempur setingkat pasukan Para Raider (Pasukan khusus yang mampu diterjunkan dari pesawat terbang didaerah tempur) atau Mobud (Mobil Udara). sedangkan anggota CPM yang sekarang hanya bertugas sebagai satuan bantuan administrasi (penegakan hukum disiplin dan tata tertib), bukan pasukan tempur.